

Pengaruh E-Procurement, Akuntansi Forensik, Audit Investigasi, dan Komitmen terhadap Pencegahan Fraud dengan Moderasi Pengendalian Internal

Dewi Purnamasari¹, Muhsin Muhsin², Juanda Astarani³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

E-mail: dewideps@student.untan.ac.id¹, muhsin@ekonomi.untan.ac.id²,
juanda.atarani@ekonomi.untan.ac.id³

Article History:

Received: 29 Juni 2026

Revised: 22 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: *e-procurement; akuntansi forensik; audit investigatif; komitmen organisasi; pengendalian internal; pencegahan kecurangan.*

Abstract: *Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi persoalan serius karena melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas tata kelola sektor publik. Penelitian ini menganalisis pengaruh e-procurement, akuntansi forensik, audit investigatif, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada aparatur yang terlibat langsung dalam proses pengadaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares melalui WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-procurement, akuntansi forensik, audit investigatif, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal juga memperkuat pengaruh keempat faktor tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan kecurangan memerlukan integrasi teknologi pengadaan, kapasitas pemeriksaan, komitmen kelembagaan, dan pengendalian internal yang efektif.*

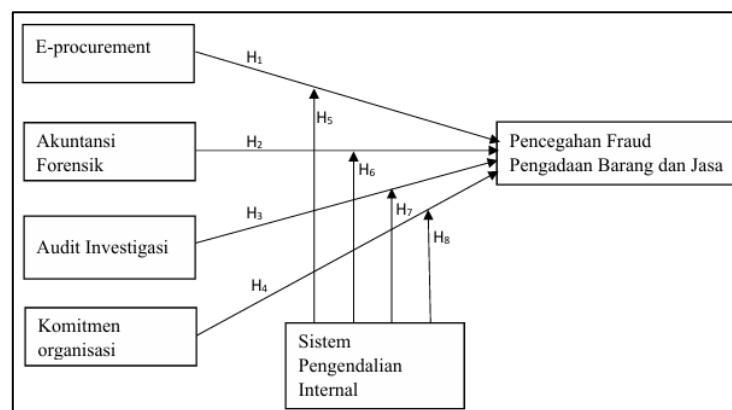
PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, merupakan proses penyediaan barang/jasa oleh instansi pemerintah yang dibiayai APBN/APBD/APBDes, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Dalam proses ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan negara untuk kepentingan publik (Yusni, 2022). Besarnya nilai anggaran dalam pengadaan seringkali membuka peluang terjadinya fraud. Kecurangan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik serta kepercayaan masyarakat (Sopyan *et al.*, 2024). Data ACFE (2020) menunjukkan bahwa korupsi menjadi bentuk fraud paling dominan di Indonesia (64,4%), diikuti penyalahgunaan aset (28,9%) dan fraud laporan keuangan (6,7%).

Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah menerapkan e-procurement sebagai sistem berbasis teknologi yang mendorong efisiensi dan akuntabilitas (Astuti & Prabowo, 2023). Dalam perspektif teori keagenan, sistem ini mampu mengurangi asimetri informasi antara agen dan

prinsipal. Selain itu, akuntansi forensik dan audit investigasi berperan penting dalam mendeteksi serta mencegah fraud melalui analisis dan investigasi sistematis (Arianto *et al.*, 2023; Rahmayanti *et al.*, 2023). Dari sisi perilaku organisasi, komitmen organisasi turut menekan perilaku oportunistik karena mencerminkan integritas dan loyalitas individu (Yusni, 2024). Sistem pengendalian internal juga menjadi mekanisme utama dalam meminimalkan peluang kecurangan melalui pengawasan dan pemantauan. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi terkait efektivitas faktor-faktor tersebut. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya research gap, terutama dalam melihat peran sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh e-procurement, akuntansi forensik, audit investigasi, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi.

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada teori keagenan yang menekankan hubungan antara prinsipal dan agen, serta teori fraud triangle yang menjelaskan bahwa fraud dipengaruhi oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Pencegahan fraud dapat dilakukan secara terpadu melalui pemanfaatan teknologi (*e-procurement*), penguatan pengawasan (akuntansi forensik dan audit investigasi), serta peningkatan komitmen organisasi. Selain itu, sistem pengendalian internal yang kuat berdasarkan kerangka COSO menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Tujuan penelitian adalah menguji pengaruh variabel e-procurement, akuntansi forensik, audit investigasi, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling–Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak WarpPLS 7.0. Structural Equation Modeling (SEM) merupakan salah satu teknik analisis multivariat dalam ilmu sosial yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara simultan (Sholihin & Ratmono, 2021). Penelitian dilaksanakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan koordinasi pengadaan pemerintah daerah. Populasi penelitian terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terlibat langsung dalam proses pengadaan serta memiliki sertifikat pengadaan, dengan jumlah total 53 orang. Sampel ditentukan menggunakan teknik judgement sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pegawai yang bekerja di Biro PBJ, memiliki

pengalaman dalam proses pengadaan, memiliki sertifikat PBJ, serta bersedia mengisi kuesioner secara lengkap.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Forms dengan skala Likert delapan poin, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Variabel penelitian meliputi variabel independen (e-procurement, akuntansi forensik, audit investigasi, dan komitmen organisasi), variabel dependen (pencegahan fraud), serta variabel moderasi (sistem pengendalian internal). Analisis data menggunakan SEM-PLS untuk mengevaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Evaluasi outer model meliputi uji validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas menggunakan composite reliability dan Cronbach's alpha. Sementara itu, evaluasi inner model mencakup koefisien determinasi (R^2), predictive relevance (Q^2), dan model fit. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis koefisien jalur, nilai t-statistik, dan p-value pada tingkat signifikansi 5% guna mengetahui pengaruh antar variabel serta peran moderasi sistem pengendalian internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah responden yang diperoleh sebanyak 44 orang sehingga data primer yang digunakan juga berjumlah 44 responden. Mayoritas responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, yaitu sebanyak 32 orang (72,7%), sedangkan responden dengan masa kerja kurang dari 10 tahun berjumlah 12 orang (27,3%).

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Sebagian besar indikator menunjukkan nilai factor loading di atas 0,7 atau memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Oleh karena itu, seluruh indikator pada variabel E-Procurement, Akuntansi Forensik, Audit Investigasi, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal (Z), serta Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (Y) dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen.

2. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

	EP	AF	AI	KO	PFP	SPI	SPI*EP
EP	0.838	0.744	0.721	0.361	0.615	0.591	0.000
AF	0.744	0.910	0.947	0.589	0.625	0.585	0.145
AI	0.721	0.947	0.925	0.530	0.539	0.526	0.084
KO	0.361	0.589	0.530	0.789	0.663	0.576	0.206
PFP	0.615	0.625	0.539	0.663	0.850	0.837	0.399
SPI	0.591	0.585	0.526	0.576	0.837	0.881	0.544
SPI*EP	0.000	0.145	0.084	0.206	0.399	0.544	1.000

Sumber : Output Olah Data WarpPLS 7.0 (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan Fornell-Larcker Criterion pada Tabel 1, seluruh indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE) pada setiap konstruk lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengukuran memiliki tingkat validitas diskriminan yang baik.

3. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Tabel 2. Hasil Uji Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Nama Laten	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	AVE	Keterangan
EP	0.946	0.927	0.703	Reliabel
AF	0.980	0.977	0.829	Reliabel
AI	0.983	0.981	0.855	Reliabel
KO	0.940	0.926	0.622	Reliabel
PFP	0.961	0.951	0.722	Reliabel
SPI	0.965	0.958	0.777	Reliabel
SPI*EP	1.000	1.000	1.000	Reliabel

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 7.0 (2025)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi kriteria reliabilitas karena nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,7. Oleh karena itu, model pengukuran yang digunakan dapat dinilai andal dan konsisten.

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

1. Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Tabel 3. Koefisien Determinasi (R-Square)

Variabel Laten Endogen	R-Square	R-Square Adjusted
Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (Y)	0.845	0.878

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 7.0 (2025)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai R-Square pada variabel Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 0,845. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 84,5% variasi pada variabel tersebut dapat dijelaskan oleh E-Procurement, Akuntansi Forensik, Audit Investigasi, Komitmen Organisasi, serta Sistem Pengendalian Internal (Z) sebagai variabel moderasi, sedangkan sisanya sebesar 15,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

2. *Predictive Relevance (Q-Square)*

Nilai Q-Square untuk variabel Y sebesar 0,763, yang lebih besar dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang baik dan relevan.

3. Uji Kelayakan Model

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai P-Value APC sebesar 0,002, sedangkan ARS dan AARS memiliki nilai $P < 0,001$. Selain itu, nilai AVIF sebesar 4,530 dan AFVIF sebesar 4,549 yang keduanya kurang dari 5, menandakan tidak terdapat masalah multikolinieritas baik antar indikator maupun antar variabel eksogen. Nilai Goodness of Fit (GoF) sebesar 0,987 ($> 0,36$) menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik. Sementara itu, nilai SPR sebesar 0,750 ($> 0,7$) mengindikasikan bahwa hubungan kausalitas dalam model tidak perlu dibalik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang dihipotesiskan telah sesuai dengan data observasi.

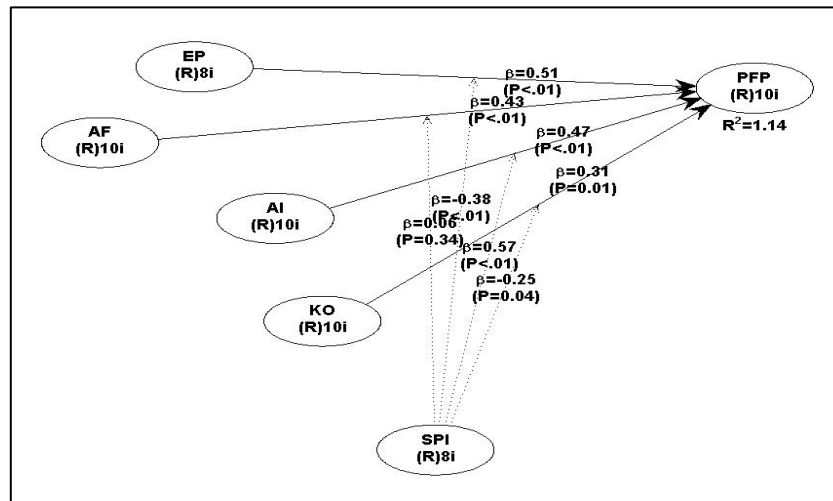
Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Hubungan Antar Variabel	Path Coefficients	P-Value	Keterangan
1	EP → PFP	0.515	0.001	Signifikan

2	AF → PFP	0.431	0.001	Signifikan
3	AI → PFP	0.465	0.001	Signifikan
4	KO → PFP	0.306	0.013	Signifikan
5	SPI*EP → PFP	0.376	0.003	Signifikan
6	SPI*AF → PFP	0.062	0.038	Signifikan
7	SPI*AI → PFP	0.566	0.001	Signifikan
8	SPI*KO → PFP	0.250	0.036	Signifikan

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 7.0 (2025)



Sumber: Hasil olah data menggunakan WarpPLS 7.0 (2025)

Gambar 1. Koefisien Jalur (*Path Coefficients*)

Berdasarkan Tabel 4, seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

1. Pengaruh E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa e-procurement berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pencegahan fraud, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis tersebut diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian Khairunnah & Nadirsyah (2022), Yusni (2022), Safitri *et al.* (2023), serta Sopyan *et al.* (2024) yang menemukan adanya pengaruh positif e-procurement terhadap pencegahan fraud. Dalam perspektif Fraud Triangle, e-procurement berfungsi meningkatkan transparansi dan mempersempit peluang terjadinya kecurangan. Sementara itu, dalam teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), e-procurement menjadi mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

2. Pengaruh Akuntansi Forensik terhadap Pencegahan Fraud

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan akuntansi forensik terhadap pencegahan fraud juga terbukti. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmayanti *et al.* (2023), Rani *et al.* (2024), Meliana *et al.* (2024), Sopyan *et al.* (2024), Nurhalisa & Rely (2024), serta Kusuma *et al.* (2025). Akuntansi forensik berperan dalam mendeteksi kecurangan secara dini dan mengurangi peluang serta rasionalisasi dalam Fraud Triangle. Dalam teori keagenan, akuntansi forensik menjadi alat pengawasan yang efektif untuk menekan perilaku oportunistik agen.

3. Pengaruh Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud

Hipotesis ketiga (H3) juga diterima, menunjukkan bahwa audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil ini didukung oleh Rahmayanti *et al.* (2023), Prasetyo *et al.* (2023), Rani *et al.* (2024), Sopyan *et al.* (2024), dan Kusuma *et al.* (2025). Audit investigasi berfungsi sebagai mekanisme deteksi dan pencegahan dengan mengurangi peluang kecurangan.

Dalam teori keagenan, audit investigasi memperkuat fungsi pengawasan melalui pemberian sanksi terhadap penyimpangan.

4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Fraud

Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud juga diterima. Temuan ini sejalan dengan Rusliyawati (2022) dan Yusni (2022). Dalam Fraud Triangle, komitmen organisasi dapat menekan tekanan dan rasionalisasi yang memicu kecurangan. Dari sudut pandang teori keagenan, komitmen organisasi menjadi mekanisme internal yang mendorong agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal.

5. Peran Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) secara signifikan memoderasi hubungan antara e-procurement, akuntansi forensik, audit investigasi, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud, sehingga seluruh hipotesis moderasi (H5–H8) diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusni (2022) dan Sopyan *et al.* (2024). Dalam teori keagenan, SPI berfungsi sebagai mekanisme kontrol formal yang mampu mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan. SPI yang kuat juga memperjelas prosedur, tanggung jawab, serta sistem pelaporan, sehingga memperkecil peluang terjadinya manipulasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara teknologi (e-procurement), pengawasan (akuntansi forensik dan audit investigasi), faktor perilaku (komitmen organisasi), serta sistem pengendalian internal merupakan strategi yang efektif dalam mencegah fraud pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan e-procurement, akuntansi forensik, audit investigasi, serta komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, sistem pengendalian internal terbukti mampu memperkuat hubungan antara seluruh variabel independen dengan pencegahan fraud. Temuan ini sejalan dengan kerangka *agency theory* dan *fraud triangle theory*, yang menekankan bahwa praktik kecurangan dapat diminimalkan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan integritas dan loyalitas sumber daya manusia. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup satu instansi, penggunaan pendekatan persepsi responden melalui kuesioner, serta keterbatasan variabel yang diteliti, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Meskipun begitu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dengan menegaskan pentingnya integrasi antara teknologi pengadaan, pendekatan investigatif, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan fraud. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek penelitian, menggunakan pendekatan *mixed methods*, serta menambahkan variabel lain seperti tekanan politik, kualitas kepemimpinan, dan *whistleblowing system* guna memperkaya model pencegahan fraud di sektor publik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, W., & Jogiyanto, H. M. (2016). *Partial least square (PLS): Alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis* (Edisi ke-2). ANDI.
- Ainun, M. D., & Justinia, C. (2024). Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa: Studi pada Telkom Corporate University. *Brainy*, 5(1), 40–50.

- Alamsyahbana, M. I., Zulfachri, B., Zulaika, N., Sitepu, A. P., & Munaf, T. (2022). Analisis penerapan SPI dan akuntansi forensik dalam upaya pendeteksian fraud secara dini. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 1343–1356. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.1343-1356.2022>
- Andari, M. W. (2020). *Pengaruh sistem pengadaan barang dan/atau jasa, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pencegahan fraud* [Tesis magister, Universitas Islam Indonesia]. Repositori Universitas Islam Indonesia.
- Arianto, B., Dinata, R. O., Ridhawati, R., Indarto, S. L., Syahrir, D. K., Rukmana, A. Y., Faisol, I. A., Yusran, M., & Andaningsih, I. G. P. R. (2023). *Akuntansi forensik*. Get Press Indonesia.
- Astuti, E., & Prabowo, T. J. W. (2023). Pengaruh implementasi e-procurement dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–12.
- Christian, N., & Resnika. (2022). Penggunaan teknik akuntansi forensik dalam pendeteksian dan pencegahan occupational fraud. *Jurnal Maneksi*, 11(1), 287–299.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*.
- Fiar, A. A., & Jaeni. (2022). Pengaruh audit forensik, audit investigasi, kompetensi auditor, profesionalisme, dan kecerdasan spiritual terhadap pencegahan fraud. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 159–169. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.628>
- Ghozali, I. (2014). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least squares (PLS)* (Edisi ke-4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0* (Edisi ke-2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). *Structural equation modeling (SEM) berbasis varian*. PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Haryono, S. (2016). *Metode SEM untuk penelitian manajemen*. PT Intermedia Personalia Utama.
- Helmi, Desyana, G., Noviaty, H., & Rusliyawati. (2022). Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Abdi Equator*, 2(2), 80–91.
- Khairunnah, I., & Nadirsyah. (2022). Pengaruh e-procurement dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 578–594.
- Kusuma, G. S. M., Kusumawaty, M., Handayani, M., & Oktarini, A. (2025). Pengaruh akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap pencegahan kecurangan dengan moralitas sebagai moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1), 136–151.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025a). *Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025 tentang penetapan pengelolaan katalog elektronik sektoral pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk mengelola kategori produk*.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025b). *Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang penetapan Tim Project Management Unit Percepatan Transformasi Pengadaan Digital*.

-
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025c). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dengan penunjukan langsung dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden*.
- Meliana, Y., Simunapendi, J. I. R., & Sandari, T. E. (2024). Analisa pengaruh akuntansi forensik, whistleblowing, dan audit investigatif terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(1), 175–184. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2687>
- MNK & Partners. (2025, February 12). *Peran akuntansi forensik dalam mengungkap kecurangan laporan keuangan*.
- Nurhalisa, I., & Rely, G. (2024). Analisis empiris akuntansi forensik dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(2), 467–476. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i2.1510>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan*.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode penelitian kuantitatif: Buku ajar perkuliahan metodologi penelitian bagi mahasiswa akuntansi dan manajemen* (Edisi ke-3). Widya Gama Press.
- Prasetyo, Y., Paramitha, D., Riyani, E. I., & Mubarak, F. (2023). Integrasi penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mendeteksi fraud: Studi literatur. *Jurnal Buana Akuntansi*, 8(1), 16–29.
- Rahmayanti, S., Sari, Y., & Periansya. (2023). Dampak penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pendeteksian fraud. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 1–11. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.6290>
- Rani, A. S., Maharani, R. A., & Machdar, N. M. (2024). Dampak penerapan akuntansi forensik dan audit investigasi serta mengevaluasi proses pengungkapan tindak pidana fraud pengadaan barang/jasa. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 187–194. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2646>
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah*.
- Safitri, R. H., Kalsum, U., Usmayanti, V., & HS, R. A. (2024). Pengaruh e-procurement terhadap pencegahan fraud di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2580–2590. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2092>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis* (Edisi ke-2). ANDI.
- Sopyan, A., Amyar, F., & Pamungkas, B. (2024). Pengaruh penerapan e-procurement, akuntansi forensik, dan audit investigasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa dimoderasi sistem pengendalian internal pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1436–1447. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.966>
- Yusni. (2022). Pengaruh implementasi e-procurement dan komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 138–148. <https://doi.org/10.31842/jurnalnobis.v5i2.219>
-